



Pengelolaan Keuangan Sekolah : Sumber Pembiayaan dan Pertanggungjawaban dalam Satuan Pendidikan

¹Yosi Sisri Nengsi, ²Difa Maulidika, ³Ahmad Sabri, ⁴Rully Hidayatullah

¹⁻⁴UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia

Email: ¹yosisisrinengsi127@gmail.com, ²dikamaulidika76@gmail.com

Korespondensi penulis : yosisisrinengsi127@gmail.com

Abstract This study aims to analyze school financial management, focusing on sources of financing and accountability mechanisms in educational institutions. Through the literature study method, this study explores various important aspects related to school financial administration, including the diversity of funding sources, the role of financial managers, and the accountability measures needed to ensure the transparent and efficient use of funds. The findings show that effective financial management has a great influence on the quality of education. Additionally, the study identifies the challenges schools face in financial management, providing valuable insights for policymakers, educators, and administrators seeking to improve financial practices in schools. The results of this research are expected to contribute to the development of a more comprehensive conceptual framework on school financial management in Indonesia.

Keywords: resources, finance, schools, accountability

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan sekolah, dengan fokus pada sumber pembiayaan dan mekanisme akuntabilitas di lembaga pendidikan. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menggali berbagai aspek penting terkait administrasi keuangan sekolah, termasuk keberagaman sumber dana, peran manajer keuangan, serta langkah-langkah akuntabilitas yang diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan efisien. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan keuangan, memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan administrator yang berupaya meningkatkan praktik keuangan di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang lebih komprehensif tentang pengelolaan keuangan sekolah di Indonesia.

Kata Kunci: sumber daya, keuangan, sekolah, akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan isu sentral dalam dunia pendidikan. Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan berbagai perspektif mengenai praktik pengelolaan keuangan sekolah, sumber pembiayaan, dan mekanisme pertanggungjawaban (Adzka, A, 2022). Efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada peserta didik (Anggal et al, 2020) Namun, masih terdapat celah pemahaman yang perlu digali lebih dalam, terutama terkait dengan tren terbaru dan tantangan yang dihadapi saat ini. Melalui studi literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang lebih utuh mengenai pengelolaan keuangan sekolah, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks pendidikan Indonesia.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan sekolah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek-aspek tertentu, seperti sumber pembiayaan atau mekanisme pertanggungjawaban (Mustari, M,2022). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sekolah (Alkurnia et al, 2017). Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif merupakan salah satu kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas (Fadilah et al,2024). Pengelolaan keuangan sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat (Kurniawan, M. A,2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan sekolah : sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban dalam satuan pendidikan. Manfaat dari kajian ini adalah memberikan panduan praktis bagi lembaga pendidikan menghadapi problematika dalam administrasi keuangan sekolah, untuk memajukan pendidikan di masa depan (Kurniawan, M. A,2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (literature study). Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang urgensi administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini. Penelitian studi literatur ini menganalisis dengan matang dan mendalam agar mendapatkan hasil yang objektif (Putri,et al, 2020).

Selanjutnya, metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data analisis isi. Untuk memulai analisis data, hasil penelitian diperiksa dari tingkat relevansinya. Selanjutnya, tahun penelitian dimulai dengan tahun yang paling baru dan kemudian mundur ke

tahun yang lebih lama. Peneliti kemudian membaca abstrak dari setiap penelitian untuk menilai apakah masalah yang dibahas sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan penelitian. Selanjutnya, mencatat elemen penting dan relevan dengan topik penelitian (Achjar et al, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Keuangan

1. Pengertian Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan salah satu bagian dari bidang administrasi. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi (Syaifullah, M. S, 2021).

Menurut Mamesah administrasi keuangan adalah: “Rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna. (mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan pembiayaan).

Menurut Siagian administrasi keuangan adalah: “Suatu truisme / paling sedikit suatu kekayaan bahwa biaya yang tersedia bagi suatu negara yang sedang giat melakukan pembangunan selalu terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang perlu dibiayai” Menurut Nawawi pengertian administrasi keuangan terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Arti sempit

Yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan.

2) Arti Luas

Yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketata usahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan, dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah (Rusdiana et al, 2022).

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan disekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan. Pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian (Hasibuan,2021).

Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan akhir dari administrasi keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

2. Proses Administrasi Keuangan

Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan Rencana Sekolah, yang disampaikan oleh Prof. Slamet PH. MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D, yang mengupas tentang:

1) Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

2) Arti Perencanaan Sekolah/RPS

Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan dan Pelaporan

Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran, untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan “*preventieve begrootings bewaking*” (penjagaan anggaran terlebih dahulu).

Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah (Rebore, 2013). Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya.

Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting, agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik.

4. Tujuan Administrasi Keuangan

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu adanya tujuan manajemen keuangan. Yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan yang berlaku.

5. Peran Guru dalam Administrasi Keuangan Sekolah

Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun jika dilihat secara luas guru juga berperan sebagai administrator pendidikan.

Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban

mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar.

Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggung jawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan.
- b. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke Pemerintah Kota.
- c. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan.
- d. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran.
- e. Membuat laporan Rancangan Pendapatan Bantuan Sekolah (RAPBS).
- f. Membuat laporan tribulan Anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- g. Menyetorkan pajak PPN dan PPH.
- h. Membagikan gaji atau rapel.
- i. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah.

Sumber Pembiayaan dalam Satuan Pendidikan

Pendanaan pendidikan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dana dari pemerintah (pusat dan daerah), kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dana dari lembaga pendidikan itu sendiri Anwar (1991) dalam (Sudarmono et al.,2020) berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan bantuan dari berbagai sumber:

1. Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah untuk membantu pendidikan dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang kesulitan finansial. Program ini memberikan dana langsung kepada sekolah negeri maupun swasta, berdasarkan jumlah siswa dan unit biaya. Tujuannya adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional. Sekolah juga harus memberikan

memberikan keringanan atau diskon kepada siswa miskin untuk iuran sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) umumnya dijalankan sebagai subsidi yang merata, melibatkan banyak sekolah dan siswa. Namun, ada beberapa sekolah yang menolak program ini, terutama yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan ini diambil oleh pengelola sekolah tanpa melibatkan musyawarah dengan orangtua siswa.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dijelaskan bahwa alokasi dana BOS Reguler dihitung dengan mengalikan satuan biaya dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya untuk setiap jenjang pendidikan adalah Rp. 900.000,00 per siswa SD, Rp. 1.100.000,00 per siswa SMP, Rp. 1.500.000,00 per siswa SMA, Rp. 1.600.000,00 per siswa SMK, dan Rp. 2.000.000,00 per siswa SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB per tahun. Jumlah peserta didik dihitung berdasarkan data NISN pada Dapodik.

2. Dana BMS

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) mencerminkan perhatian pemerintah terhadap siswa yang mengalami kesulitan finansial. Tujuan pemberian dana ini adalah mencegah agar siswa miskin tidak terhenti dalam mengejar pendidikan akibat kesulitan keuangan, sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikannya. Penerima manfaat dari bantuan ini adalah siswa yang dikategorikan kurang mampu atau miskin.

3. Masyarakat

Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat mencari dan menggali sumber dana dari masyarakat, individu, lembaga, dalam negeri, maupun luar negeri, sesuai dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh perlu digunakan secara efektif dan efisien, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap dana harus digunakan sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

4. Orang tua/Wali Siswa

Pendanaan ini sering kali dikenal sebagai infak dan SPP bulanan. Ada berbagai jenis pengeluaran keluarga terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, meskipun tidak semua komponen berlaku di setiap sekolah. Data ini

menggambarkan sejumlah besar pengeluaran yang ditanggung oleh orang tua siswa, termasuk hal-hal yang menurut aturan "tidak lagi dibenarkan" dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan melibatkan:

- 1) Uang Pangkal
- 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP
- 3) Biaya Ulangan Tengah Semester
- 4) Biaya Ulangan Akhir Semester
- 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler
- 6) Biaya Kegiatan Praktikum
- 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS
- 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah
- 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental/Retret
- 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP)
- 11) Biaya-biaya lainnya.

Menurut Pendapat Nursobah membagi sumber pembiayaan menjadi 3 yaitu:

1. Pemerintah memberikan biaya rutin, biaya pembangunan, biaya Inpres, dan subsidi bantuan pembangunan pendidikan.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) masih berlaku untuk SLTA dan Perguruan Tinggi.
3. Sumbangan untuk Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).

Kemudian Sumber pembiayaan/anggaran pendidikan menurut (Habibi et al.,2022) ada 7,yaitu:

1. Anggaran Pendidikan Nasional

Anggaran pendidikan nasional mencakup semua penerimaan kas dari negara yang secara sengaja diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah. Contohnya adalah dana pendampingan operasional, dana hibah kompetitif, biaya operasional sekolah (BOS), dan lain-lain.

2. Anggaran Pendidikan Provinsi.

Pendapatan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah berasal dari kas negara. Bantuan ini mencakup buku, hibah untuk

pembangunan ruang kelas baru, dana pembangunan kembali sekolah, beasiswa murid, dan banyak lagi.

3. Anggaran Pendidikan Kota/Kabupaten

Pendapatan uang dari pemerintah provinsi untuk sekolah berasal dari kas kota/kabupaten dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti buku, bangku, meja, pelatihan kurikulum, hibah pembangunan kelas baru, rekonstruksi sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

4. Anggaran Komite Sekolah.

Pendanaan dari orang tua siswa dapat berupa uang, buku, seragam, alat tulis, bahan ajar, biaya bulanan, dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

5. Anggaran Yayasan

Bantuan yang diberikan oleh pengurus yayasan sekolah untuk program pendidikan. sekolah dapat berupa buku, alat tulis, meja, kursi, tanah, bangunan, atau untuk rutin seperti beasiswa bagi guru dan siswa.

6. Anggaran Donatur

Sumbangan yang diberikan oleh donatur perorangan atau lembaga tertentu untuk mendukung program sekolah dapat berupa dana, jasa, atau barang. Contohnya, dana hibah dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, World Association Moslem Youth (WAMY). dan lain-lain.

Pengelola Keuangan Sekolah

1. Pengertian

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi- fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan.

Manajemen keuangan di tingkat sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan manajemen keuangan secara umum. Departemen Pendidikan Nasional (2011) mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan kata lain pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional memungkinkan satuan pendidikan tumbuh secara optimal dan pada akhirnya diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Sekolah bukanlah lembaga yang bersifat mencari profit, maka setiap penerimaan sekolah harus digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan itu sendiri.

2. Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

a. Efisien

Efisien terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Seringkali efisiensi digambarkan sebagai perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- 1) Dari penggunaan masukan (input), bahwa kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- 2) Dari sisi hasil (output), bahwa kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya.

b. Keadilan

Keadilan dalam pengelolaan keuangan adalah adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Prinsip ini menjadi penting pada organisasi yang menyediakan layanan publik seperti pendidikan, karena fokus pelayanan adalah agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pendidikan. Pengelolaan keuangan diselenggarakan untuk mendukung pencapaian pemerataan kesempatan tersebut.

c. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan di bidang pengelolaan keuangan sekolah. Pada lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan akan kebijakan-kebijakan keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan

jumlahnya, keterbukaan penggunaan serta pertanggungjawabannya sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

3. Perencanaan Pengelolaan Dana Sekolah

Sebelum melakukan pengalokasian anggaran untuk belanja sekolah, kepala sekolah harus membuat perencanaan pengelolaan dana sekolah. Perencanaan pengelolaan dana sekolah mengacu pada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan program-program yang direkomendasikan dari hasil EDS. Berdasarkan hasil EDS maka disusunlah program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri jangka menengah (4 tahun) berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan jangka pendek (1 tahun) berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Saat merencanakan pengelolaan dana perlu dilakukan analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaannya ini menghasilkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan

rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran yang bersifat terpadu, berisi rencana penerimaan dan pengeluaran. RKAS ini merupakan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan asas atau prinsip penganggaran, semua pendapatan dan belanja sekolah harus dicantumkan dalam RKAS dan disusun sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. Semua dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sekolah yang disusun berdasarkan skala prioritas dan alokasi dana harus realistis.

Penyusunan RKAS memerlukan juga rincian pembiayaan, siapa yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, kegiatan dalam RKAS dapat dijabarkan lagi menjadi kegiatan bulanan atau mingguan, sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, atau menjadi suatu rincian program yang merupakan bagian RKAS. Rincian program berupa kegiatan bulanan atau mingguan tersebut dapat dilampirkan dalam RKAS atau lampiran dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang digunakan.

Penentuan besaran biaya dalam RKAS dapat mengacu kepada ketentuan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, atau ketentuan lain yang berlaku, atau menurut harga pasar (sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa). Semua sumber dana harus dicantumkan dalam RKAS, baik dana yang diterima satuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan sumber lainnya.

4. Pembelanjaan Dana Sekolah

Seperti halnya pada tahap perencanaan keuangan, dalam proses pembelanjaan dana sekolah harus mengacu pada Peraturan-peraturan maupun Petunjuk Teknis dari sumber pendapatan keuangan sekolah atau berdasarkan ketentuan pemberi dana dan sekolah. Setiap sumber dana umumnya menetapkan syarat bagi penggunaan dana tersebut (kecuali tidak dinyatakan demikian). Sebagai contoh dana dari pemerintah sudah ditentukan peruntukannya untuk anggaran rutin seperti gaji dan tunjangan, tunjangan beras, uang lembur, keperluan kantor, inventaris kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, daneliharaan/perbaikan ruang kelas/gedung sekolah. Hibah dari lembaga-lembaga donor maupun dunia usaha dan industri juga seringkali menetapkan ketentuan-ketentuan penggunaan dana yang harus ditaati oleh sekolah.

Penggunaan BOS di sekolah diatur dengan petunjuk teknis melalui Permendikbud. Oleh karena itu kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah yang bersumber dari

dana BOS harus memperhatikan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Bab V tentang Penggunaan Dana BOS harus memenuhi ketentuan berikut:

- (1) Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.
- (3) Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan dana BOS harus mengacu pada komponen-komponen yang sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam Peraturan Menteri yang mengatur Penggunaan dana BOS pada tahun berjalan.

Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah (Rebore, 2013). Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting, agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik.

Pertanggung jawaban anggaran rutin, pembangunan, dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada wali kota/ bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah.
- 2) Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan I
- 3) Apabila sampai dengan tanggal 20 bulang berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan II.
- 4) Kelengkapan lampiran SPJ:
 - a. Surat pengantar.
 - b. Sobekan BKU lembar 2 dan 3.
 - c. Daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal/komponen.
 - d. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP.
 - e. Laporan keadaan Kas rutin/ pembangunan (LKKR/LKKP) table I dan II.
 - f. Register penutupan KAS setiap 3 bulan sekali.
 - g. Fotokopi SPMU beban tetap dan beban sementara.
 - h. Fotokopi rekening Koran dari bank yang ditunjuk
 - i. Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak
 - j. Bukti setor PPN/PPH 21, 22, 23 (forocopi SSP)

Problematika Keuangan Sekolah

Problematika keuangan sekolah merupakan isu kompleks yang kerap dihadapi oleh lembaga pendidikan di berbagai tingkatan. Isu-isu ini dapat berasal dari internal sekolah maupun eksternal, dan seringkali saling terkait. Berikut adalah beberapa problematika utama yang sering dijumpai:

- 1) Keterbatasan Anggaran
 - a. Sumber Pendapatan Terbatas: Sekolah seringkali bergantung pada anggaran pemerintah, sumbangan orang tua, dan hasil usaha sendiri. Keterbatasan sumber pendapatan ini membuat sekolah kesulitan memenuhi semua kebutuhan operasional dan pengembangan (Kusyudiyanto et al,2023).
 - b. Tingginya Biaya Operasional: Biaya operasional sekolah terus meningkat, terutama untuk kebutuhan seperti gaji guru, biaya listrik, air, perawatan gedung, dan pembelian peralatan.

2) Prioritas Penganggaran yang Sulit

- a. Kebutuhan yang Beragam: Sekolah memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok seperti buku dan alat tulis hingga kebutuhan pengembangan seperti laboratorium dan perpustakaan.
- b. Konflik Prioritas: Sulit untuk menentukan prioritas penganggaran yang tepat, terutama ketika sumber daya yang tersedia sangat terbatas.

3) Transparansi dan Akuntabilitas yang Rendah

- a. Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan sekolah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.
- b. Laporan Keuangan yang Tidak Jelas: Laporan keuangan yang tidak jelas dan tidak transparan membuat sulit bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban

4) Pengelolaan Dana yang Tidak Efektif

- a. Kurangnya Kompetensi: Kurangnya kompetensi pengelola keuangan sekolah dalam menyusun anggaran, melakukan pengadaan barang dan jasa, serta membuat laporan keuangan yang akurat dapat menyebabkan pemborosan dan inefisiensi.
- b. Sistem Informasi yang Belum Memadai: Sistem informasi yang belum terintegrasi dan terotomatisasi membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lebih rumit dan rentan terhadap kesalahan.

5) Tantangan dalam Mengelola Dana BOS

- a. Persyaratan yang Kompleks: Persyaratan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kompleks seringkali membuat sekolah kesulitan dalam mengelola dana tersebut.
- b. Fokus pada Input Bukan Output: Penilaian terhadap penggunaan dana BOS yang lebih fokus pada input (misalnya jumlah siswa) daripada output (misalnya peningkatan mutu pembelajaran) dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana.

Problematika yang terjadi dapat mengakibatkan hal hal sebagai berikut:

- a. Penurunan Kualitas Pendidikan: Keterbatasan anggaran dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan, seperti pengadaan sarana prasarana yang memadai, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru.

- b. Ketidakmerataan Pendidikan: Perbedaan sumber daya keuangan antara sekolah satu dengan yang lain dapat menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan.
- c. Ketidakpercayaan Masyarakat: Kasus penyimpangan atau penyalahgunaan dana dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- d. Hambatan dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional: Problematika keuangan sekolah dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Solusi problematika keuangan sekolah

- 1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
- 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- 3. Optimalisasi Penggunaan Dana
- 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- 5. Peningkatan Alokasi Anggaran

4. KESIMPULAN

Administrasi keuangan merupakan salah satu bagian dari bidang administrasi. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. administrasi keuangan adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan dalam suatu organisasi.

Tujuan akhir dari administrasi keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan Rencana Sekolah, dalam administrasi keuangan juga penting adanya pemeriksaan dan pelaporan, pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran, untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun jika dilihat secara luas guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Pendanaan pendidikan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dana dari pemerintah (pusat dan daerah), kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dana dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip seperti keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sebelum melakukan pengalokasian anggaran untuk belanja sekolah, kepala sekolah harus membuat perencanaan pengelolaan dana sekolah. Perencanaan pengelolaan dana sekolah mengacu pada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan program-program yang direkomendasikan dari hasil EDS. Seperti halnya pada tahap perencanaan keuangan, dalam proses pembelanjaan dana sekolah harus mengacu pada Peraturan-peraturan maupun Petunjuk

Teknis dari sumber pendapatan keuangan sekolah atau berdasarkan ketentuan pemberi dana dan sekolah. Setiap sumber dana umumnya menetapkan syarat bagi penggunaan dana tersebut (kecuali tidak dinyatakan demikian).

Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola Pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan

REFERENSI

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adzka, A. (2022). Analisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP Islam Terpadu Rahmatan Lil Alamin (Bachelor's thesis, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Afriansyah, H. (2019). Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Padang.
- Alkurnia, R., & Anggraini, A. (2017). Pengelolaan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan (Studi pada sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta). In Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (Vol. 3, No. 1).
- Anggal, N., Yuda, Y., & Amon, L. (2020). Manajemen pendidikan: Penggunaan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. CV. Gunawana Lestari.
- Arikunto, S., & Y. L. (2008). Manajemen pendidikan. Aditya Media dan FIP UNY.
- Danial, E. (2009). Metode penulisan karya ilmiah. Laboratorium Pendidikan.
- DR HA Rusdiana, M. M., Wardija, H., & AP, M. (2022). Manajemen keuangan sekolah: Konsep prinsip dan aplikasinya di sekolah/madrasah. Arsad Press.
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., & Rahman, I. F. (2024). Mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan dengan literasi digital: Peran teknologi di era SDGs 2030. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 106-121.
- Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan tata kelola keuangan pendidikan sekolah dasar pada akhir periode tahun 2020. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(1), 304-309.
- Kurniawan, M. A. (2023). BAB 5 Manajemen keuangan pendidikan: Mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. In Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, dan Implementasi Praktis (pp. 123).

- Kusyudiyanto, N., Santosa, A. B., & Hidayati, D. (2023). Strategi manajemen pembiayaan sekolah swasta dalam menciptakan sekolah unggulan di SMK Muhammadiyah 3 Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1834-1857.
- Mustari, M. (2022). Administrasi dan manajemen pendidikan sekolah. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nawawi, H. (1994). Administrasi pendidikan. Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2005). Metode riset (5th ed.). Ghalia Indonesia.
- Purwanto, N. (2007). Administrasi pendidikan. Suka Jaya.
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi literatur tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran the power of two di SD. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 6(2), 605-610.
- Sukirman, H. (2000). Manajemen tenaga pendidikan. FIP UNY.
- Syaifullah, M. S. (2021). Manajemen keuangan pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 4(1).